



Gap Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Obat (Studi Kasus Wilayah yang Minim Peran BNN dan BK)

Winda Noviana^{1*}, Feida Noorlaila Isti'adah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Indonesia

Email : santaviana.mey@gmail.com¹ feida@umtas.ac.id²

Alamat: Jalan Tamansari Gobras No. 29, Mulyasari, Tamansari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46196,
Indonesia

Korespondensi penulis: santaviana.mey@gmail.com

Abstract: Drug abuse is a serious issue that affects public health, social dynamics, and the economy in various regions. In areas with limited roles of the National Narcotics Agency (BNN) and Guidance and Counseling (BK), preventive strategies are often suboptimal, creating gaps in mitigation efforts. This study aims to identify the gaps in drug prevention strategies in such areas, focusing on causal factors, challenges, and opportunities for improvement. The methods employed include literature reviews and interviews with community members and relevant stakeholders. The results indicate that the lack of human resources, limited access to education, and low public awareness are the primary challenges. Recommended strategies include empowering local communities, enhancing educational institutions' roles, and fostering cross-sector collaboration to strengthen prevention efforts in regions where the roles of BNN and BK are constrained.

Keywords: Drug, Abuse, Prevention, Strategies

Abstrak. Penyalahgunaan obat merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi di berbagai wilayah. Di daerah yang minim peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bimbingan dan Konseling (BK), strategi pencegahan sering kali tidak berjalan optimal, sehingga menciptakan celah dalam upaya mitigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam strategi pencegahan perlindungan obat di wilayah tersebut dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, tantangan, dan peluang perbaikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan masyarakat serta pihak terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia, minimnya akses pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama. Rekomendasi strategi meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan lembaga peran pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pencegahan di wilayah dengan peran BNN dan BK yang terbatas.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Obat, Strategi, Pencegahan

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan obat merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang terus berkembang di berbagai wilayah, yang tidak hanya mengancam kesehatan individu tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan banyak daerah yang masih terpapar buruknya pengaruh dari penyalahgunaan tersebut. BNN sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, meskipun sudah melakukan berbagai program pencegahan, belum mampu menjangkau secara optimal seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas (BNN, 2020).

Di beberapa wilayah dengan peran BNN dan BK yang terbatas, strategi pencegahan sering kali tidak berjalan secara efektif. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan obat. Pada daerah-daerah tersebut, faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap informasi serta program pencegahan menjadi tantangan besar yang harus diatasi (Sari, 2018).

Penyalahgunaan obat bukan hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan masalah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Dampak sosial yang ditimbulkan dapat berupa peningkatan angka kriminalitas, gangguan pada struktur keluarga, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, secara ekonomi, penyalahgunaan obat juga berkontribusi pada meningkatnya beban anggaran negara untuk pengobatan dan rehabilitasi, serta kerugian produktivitas yang ditimbulkan akibat absennya tenaga kerja yang terlibat dalam penyalahgunaan obat (Ghosh, 2020). Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan obat harus menjadi prioritas utama, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini, koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

Namun, meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN dan lembaga terkait lainnya, seperti melalui pendidikan anti-narkoba di sekolah-sekolah dan kampanye media, hasilnya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses terhadap program pendidikan yang memadai, serta minimnya tenaga pendidik dan konselor di daerah-daerah terpencil (Budianto, 2019). Selain itu, faktor budaya yang menganggap penyalahgunaan obat sebagai masalah pribadi dan bukan sebagai masalah sosial juga turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi upaya pencegahan penyalahgunaan obat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi strategi pencegahan penyalahgunaan obat di wilayah dengan peran BNN dan BK yang terbatas. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab, tantangan yang dihadapi, dan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperbaiki strategi pencegahan yang ada. Melalui pendekatan studi

literatur dan wawancara dengan masyarakat serta pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi yang ada dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan di wilayah yang dimaksud.

2. KAJIAN TEORITIS

Penyalahgunaan Obat

Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan medis yang direkomendasikan oleh profesional kesehatan. Menurut Simpson dan Sells (2017), penyalahgunaan obat dapat melibatkan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, penggunaan obat tanpa resep, atau penggunaan obat untuk tujuan non-medis seperti untuk mendapatkan efek samping tertentu, seperti perasaan senang atau euforia. Obat-obatan yang sering disalahgunakan termasuk analgesik opioid, obat tidur, dan obat-obatan yang mengandung antihistamin seperti difenhidramin, yang terdapat dalam produk seperti Saledryl. Salah satu alasan utama penyalahgunaan obat adalah ketidakpahaman masyarakat mengenai risiko jangka panjang yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan obat yang tidak sesuai aturan.

Ghosh (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa banyak individu yang menggunakan obat-obatan ini sebagai bentuk *self-medication*, atau upaya untuk mengatasi stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya tanpa konsultasi medis. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan obat yang pada akhirnya berujung pada ketergantungan atau gangguan kesehatan mental dan fisik yang lebih serius. Selain itu, faktor sosial seperti lingkungan yang kurang mendukung atau kurangnya informasi tentang penggunaan obat yang aman turut memperburuk masalah ini (Puspitasari, 2017).

Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Obat

Strategi pencegahan penyalahgunaan obat melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi penggunaan obat secara sembarangan. Hall dan Hinson (2020) menyatakan bahwa ada dua pendekatan utama dalam pencegahan penyalahgunaan obat, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah individu terlibat dalam penyalahgunaan obat sejak awal, melalui pendidikan tentang bahaya obat dan promosi perilaku sehat. Ini bisa dilakukan di tingkat sekolah, komunitas, dan keluarga. Sedangkan pencegahan sekunder berfokus pada kelompok yang telah mulai

menggunakan obat secara sembarangan namun belum terjerumus dalam ketergantungan, melalui intervensi dini seperti konseling atau program rehabilitasi ringan.

Selain itu, model pencegahan berbasis komunitas juga memiliki peran penting, terutama di daerah yang minim fasilitas kesehatan atau pendidikan. Menurut Glynn dan D'Agostino (2018), model ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam mengurangi angka penyalahgunaan obat. Komunitas yang lebih teredukasi dan memiliki kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencegahan.

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN berperan dalam mengoordinasikan upaya pencegahan narkoba, termasuk di dalamnya penyalahgunaan obat-obatan yang memiliki potensi ketergantungan. Menurut Sari (2018), peran BNN sangat krusial dalam mengembangkan kebijakan nasional terkait pencegahan narkoba dan penyalahgunaan obat, serta memastikan bahwa program-program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal.

Namun, efektivitas BNN dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, termasuk dengan instansi pendidikan, kesehatan, serta tokoh masyarakat. Di banyak daerah, terutama yang terpencil atau minim akses, keberadaan BNN sering terbatas sehingga program pencegahan yang dilakukan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi antara BNN dan pihak terkait menjadi kunci dalam memperluas jangkauan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat (Ghosh, 2020).

Bimbingan dan Konseling (BK)

Bimbingan dan konseling (BK) adalah layanan yang diberikan untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis atau sosial yang berhubungan dengan kesehatan mental atau perilaku. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan obat, BK berperan penting dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada individu yang berisiko atau sudah mulai terlibat dalam penyalahgunaan obat. Petry (2019) menjelaskan bahwa konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional dapat membantu individu untuk mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab mereka terlibat dalam penyalahgunaan obat dan memberikan mereka alat serta strategi untuk mengelola masalah tersebut dengan cara yang lebih sehat.

Di banyak daerah, peran Bimbingan Konseling (BK) di sekolah-sekolah atau komunitas sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan obat. Sari (2018) menekankan bahwa, di daerah dengan akses terbatas, konselor yang terlatih sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah penyalahgunaan obat pada remaja. Konselor dapat memberikan pendidikan tentang bahaya obat serta mengarahkan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan obat untuk menjalani program rehabilitasi atau intervensi yang lebih intensif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kesenjangan dalam strategi pencegahan penyalahgunaan obat di wilayah dengan keterbatasan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bimbingan dan Konseling (BK). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap faktor penyebab, tantangan, dan peluang perbaikan melalui kombinasi studi literatur dan wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup artikel jurnal, buku, laporan resmi, dan publikasi terkait. Studi literatur ini bertujuan memberikan landasan teoritis serta membandingkan temuan dengan praktik terbaik di berbagai wilayah, sebagaimana disarankan oleh Creswell (2018), bahwa kajian literatur berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk mengarahkan analisis penelitian. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci seperti masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan tokoh yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria tertentu, sedangkan pertanyaan wawancara berfokus pada faktor penyebab penyalahgunaan obat, tantangan pencegahan, dan solusi kontekstual. Menurut Yin (2018), wawancara mendalam merupakan alat utama dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam dari perspektif partisipan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan proses koding awal, kategorisasi tema, dan interpretasi untuk menghubungkan temuan dengan konteks teori dan praktik. Teknik ini dipilih karena kemampuannya dalam menyusun data secara sistematis dan menghasilkan pemahaman yang terorganisasi, sesuai dengan pandangan Nowell et al. (2017) bahwa analisis tematik memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data kualitatif. Validitas penelitian ditingkatkan melalui

triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, temuan literatur, dan observasi lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Carter et al. (2014), yang menekankan pentingnya triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memberikan rekomendasi yang praktis dan kontekstual dalam memperkuat strategi pencegahan penyalahgunaan obat di wilayah yang minim dukungan dari BNN dan BK. Adapun objek penelitian ini adalah penyalahgunaan obat di Kelurahan Setiawaras.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan obat di Kelurahan Setiawaras, memiliki pola yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan wawancara, salah satu informan yang menyalahgunakan obat saudara D (26) menyatakan, *"Saya sudah memakai Saledryl selama dua tahun, biasanya sekali minum langsung 12 tablet, terutama saat ada momen seperti malam takbiran dan tahun baru."* Selain itu, diperkirakan terdapat sekitar 30 orang pengguna di kampung ini, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia muda dan belum menikah. Konsumsi obat ini cenderung dilakukan secara individual, tanpa pengaruh langsung dari kelompok, meskipun lingkungan sosial tertentu turut mendukung perilaku ini.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat serta minimnya intervensi dari lembaga resmi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan program Bimbingan dan Konseling (BK), memperparah kondisi ini. Tidak adanya akses mudah terhadap edukasi atau program pencegahan menyebabkan pola konsumsi obat menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.

Faktor Penyebab dan Tantangan

Minimnya peran BNN dan BK di sejumlah wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala utama. BNN, sebagai lembaga utama dalam pencegahan dan penanganan narkoba, memiliki keterbatasan dalam menyebarkan personel ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terutama terjadi di daerah terpencil, pedesaan, atau wilayah dengan akses geografis yang sulit. Dalam konteks sekolah, konselor BK sering kali hadir dalam jumlah yang tidak memadai atau bahkan tidak tersedia sama sekali, sehingga program pencegahan penyalahgunaan obat di sekolah tidak berjalan maksimal.

Kedua, minimnya akses pendidikan dan informasi terkait bahaya penyalahgunaan obat menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat di wilayah tertentu yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai dampak negatif kedokteran. Pendidikan tentang

penyalahgunaan obat sering kali hanya berpusat pada kota-kota besar, sementara daerah pedesaan atau keinginan cenderung terabaikan. Rendahnya tingkat literasi menyebabkan masyarakat tidak mampu mengenali tanda-tanda yang merujuk obat, baik pada diri sendiri, anggota keluarga, maupun komunitas sekitar.

Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencegahan penyalahgunaan obat. Di beberapa wilayah, penyalahgunaan obat masih dianggap sebagai isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Tidak adanya pemahaman yang cukup tentang bahaya penyalahgunaan obat membuat masyarakat kurang proaktif dalam mendukung program pencegahan atau melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, wilayah dengan peran BNN dan BK yang terbatas juga menghadapi tantangan stigma sosial. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak terkait menyatakan "*tantangan yang dihadapi adalah stigma sosial, korban pelahguna obat-obatan takut di penjara, dan apabila di tangkap mendapatkan diskriminasi dari masyarakat*". Korban merujuk obat sering kali menghadapi diskriminasi dari masyarakat, yang justru mendorong mereka untuk semakin terlindungi dan sulit mendapatkan bantuan. Tanpa adanya dukungan dari lembaga seperti BNN atau BK, korban penyalahgunaan obat memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan rehabilitasi atau pendampingan yang mereka butuhkan.

Dampak Kesenjangan Strategi Pencegahan

Minimnya peran BNN dan BK di suatu wilayah memiliki konsekuensi serius terhadap upaya penyalahgunaan obat. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan kasus teknologi obat-obatan, terutama di kalangan remaja. Berdasarkan wawancara dengan Bapa A (33) selaku Guru BK di SMK menyatakan "*kurangnya edukasi dan informasi serta pengawasan terhadap bahaya penyalahgunaan obat, remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, termasuk propaganda penyalahgunaan obat*".

Selain itu, deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan obat juga menjadi masalah utama. Di sekolah, peran konselor BK sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal penyalahgunaan obat pada siswa. Namun, ketika peran ini tidak ada, siswa yang terlibat dalam penularan penyalahgunaan obat sering kali tidak teridentifikasi hingga kondisi mereka menjadi lebih parah.

Dampak lainnya adalah rendahnya efektivitas program rehabilitasi . Wilayah yang tidak memiliki dukungan langsung dari BNN atau BK cenderung kesulitan menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban konservasi obat. Tanpa rehabilitasi, korban penyalahgunaan obat memiliki risiko besar untuk kembali terlibat dalam konteks pengobatan, menciptakan siklus yang sulit dihentikan.

Peluang dan Rekomendasi Strategi

Meskipun terdapat banyak tantangan, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki strategi pencegahan di wilayah dengan peran BNN dan BK yang terbatas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan komunitas lokal, program pencegahan narkoba dapat berjalan lebih efektif. Pelatihan dan edukasi kepada masyarakat lokal dapat membantu menciptakan agen-agen perubahan yang mampu memberikan informasi dan dukungan kepada komunitasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H selaku Kepala BNN Tasikmalaya, *“Sebelum BNN, dalam penyalahgunaan obat ada tugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk meninjau dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah atas obat-obat tertentu, perlu dilakukan pengawasan secara lebih optimal”*. Selain peran BNN, pihak BPOM juga perlu adanya pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan obat di masyarakat terutama di wilayah yang minim edukasi dan informasi.

Selain itu, peningkatan peran lembaga pendidikan juga sangat penting. Sekolah dapat menjadi pusat edukasi tentang bahaya penyalahgunaan obat. Guru-guru dapat dilatih untuk mengambil peran sebagai konselor sementara, terutama di wilayah yang tidak memiliki tenaga BK. Selain itu, sekolah dapat mengintegrasikan materi tentang bahaya penyalahgunaan obat ke dalam kurikulum pembelajaran.

Sinergi antar sektor juga menjadi solusi yang menjanjikan. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mendukung program pencegahan penyalahgunaan obat. Misalnya, perusahaan swasta dapat memberikan dana atau fasilitas untuk program pendidikan, sementara LSM dapat membantu menyebarkan informasi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi alat yang efektif. Penyuluhan yang berani melalui media sosial atau aplikasi khusus tentang bahaya penyalahgunaan obat dapat menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Teknologi juga dapat digunakan untuk menyediakan layanan konseling jarak jauh bagi korban ekosistem obat.

Terakhir, pengembangan program rehabilitasi berbasis komunitas dapat menjadi alternatif untuk membantu korban penyalahgunaan obat di wilayah yang tidak memiliki akses langsung ke layanan rehabilitasi formal. Program ini dapat melibatkan masyarakat lokal dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada korban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat di Kelurahan Setiawaras, menjadi masalah serius akibat minimnya intervensi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bimbingan dan Konseling (BK). Beberapa faktor penyebab utama meliputi kurangnya sumber daya manusia, minimnya akses pendidikan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan obat. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya strategi pencegahan, yang berdampak pada meningkatnya prevalensi penyalahgunaan obat terutama di kalangan remaja.

Meski demikian, terdapat peluang untuk memperbaiki situasi melalui pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan peran lembaga pendidikan, sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan program rehabilitasi berbasis komunitas. Langkah-langkah ini berpotensi memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan obat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan peran BNN dan BK.

Saran dari penelitian ini mencakup beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan obat di Kelurahan Setiawaras. Pertama, pemberdayaan masyarakat lokal perlu menjadi prioritas dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan komunitas lokal sebagai agen perubahan dalam program pencegahan. Pelatihan khusus bagi masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka terkait bahaya penyalahgunaan obat. Kedua, adanya pengawasan yang ketat dari BPOM untuk mengawasi peredaran obat-obatan di Indonesia. Ketiga, peran lembaga pendidikan perlu diperkuat melalui integrasi materi bahaya penyalahgunaan obat ke dalam kurikulum sekolah. Guru juga dapat dilatih untuk berperan sebagai konselor sementara di daerah yang tidak memiliki tenaga Bimbingan dan Konseling (BK). Keempat, kolaborasi lintas

sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta harus ditingkatkan untuk mendukung penyediaan fasilitas, pendanaan, dan penyebaran informasi yang lebih merata. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti media sosial dan aplikasi digital, dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba sekaligus menyediakan layanan konseling jarak jauh. Terakhir, program rehabilitasi berbasis komunitas perlu dikembangkan untuk memberikan dukungan emosional dan sosial kepada korban penyalahgunaan obat, khususnya di wilayah yang sulit menjangkau layanan rehabilitasi formal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan strategi pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2020). Laporan tahunan BNN: Pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Budianto, R. (2019). Strategi pendidikan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah terpencil. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(1), 92–105.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ghosh, A. (2020). Economic and social impact of drug abuse: A review of global trends. *Journal of Public Health*, 35(4), 712–718.
- Glynn, S. M., & D'Agostino, D. (2018). Community-based approaches to substance abuse prevention. *Journal of Drug Education*, 48(3), 45–56.
- Hall, W., & Hinson, R. (2020). Drug prevention strategies: Global and local approaches. *Addiction Science & Clinical Practice*, 15(1), 1–13.
- Here is the list of references formatted in APA style:
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Petry, N. M. (2019). Self-medication and substance use disorders: Implications for prevention and treatment. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 105, 57–68.
- Puspitasari, N. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah terpencil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 22(3), 171–185.
- Sari, D. (2018). Tantangan pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah dengan sumber

daya terbatas. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 10(2), 45–58.

Simpson, D. D., & Sells, S. B. (2017). Opioid use disorder: Theory, practice, and policy. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 77, 1–8.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.